

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut asas *desentralisasi* yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas- asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Bandung adalah salah satu instansi pemerintahan yang berada di lingkungan Kabupaten Bandung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal sebagaimana Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perijinan pada Renstra tahun 2011 s/d 2015.

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan

pedoman pada saat melaksanakan tugas. Banyak ketimpangan dan permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi publik yang berpangkal dari sebuah pengelolaan keuangan. Baik itu dari segi transparansi maupun akuntabilitas sebuah pengelolaan keuangan.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR.

Menurut (Mardiasmo, 2012:133) Dimensi-dimensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan keuangan daerah adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan

- c. Internal Satuan Kerja
- d. SDM

Kinerja pegawai dalam suatu organisasi merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan, sehingga kinerja tidak hanya menyangkut karakteristik pribadi masing-masing pegawai, melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang.

Setiap organisasi memiliki keinginan untuk mencapai kinerja yang optimal, untuk mencapai kinerja yang optimal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh komitmen yang dimiliki oleh karyawan yang ada didalam organisasi tersebut. Sebagai wujud profesionalisme dan tanggung jawab aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, diperlukankualitas kinerja aparatur negara yang berorientasi pada mutu pelayanan publik (*public service*).

Berdasarkan penelitian awal yang yang dilakukan oleh peneliti di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung (BPMP), peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Penyerapan Anggaran dalam Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi. Berikut ini adalah tabel bukti terjadinya Penyerapan Anggaran Keuangan Daerah pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung (BPMP) dalam bentuk capaian realisasi kinerja pada tahun 2019.

Tabel 1
Rekapitulasi Kegiatan BPMP Tahun Anggaran 2019

No.	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		%	Sisa	Target (%)		Ket
		Anggaran	Realisasi			Min	Max	
A	ANGGARAN MUTLAK DAN WAJIB BPMP	2.209.241.100	2.105.958.150					
	BELANJA LANGSUNG MUTLAK	610.497.350	600.674.100					
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	530.317.350	520.548.600	98,15	14.700.000	98	100	Tercapai
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	42.583.000	42.583.000	100	0	98	100	Tercapai
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	20.100.000	20.100.000	100	0	98	100	Tercapai
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.497.000	17.497.000	100	0	98	100	Tercapai

B	BELANJA LANGSUNG WAJIB	1.598.743.750	1.505.284.050					
I.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi							
1.	Kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar, kecil dan menengah	224.822.500	216.536.300	96,3	8.286.200	98	100	Tidak Tercapai
2.	Kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha	149.485.000	131.001.000	87,4	18.484.000	98	100	Tidak Tercapai
3.	Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal	249.866.250	209.995.250	84,04	39.871.000	98	100	Tidak Tercapai

4.	Kegiatan peningkatan kualitas sdm guna peningkatan pelayanan investasi	100.000.000	100.000.000	100	0	98	100	Tercapai
5.	Penyelenggaraan pameran investasi	374.970.000	374.598.000	99,9	372.000	98	100	Tercapai
II.	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	249.625.000	233.791.500					
1.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	99.662.500	93.562.500	93,9	6.075.000	98	100	Tidak Tercapai
2.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	149.962.500	140.229.000	93,5	9.733.500	98	100	Tidak Tercapai
III.	Program Penyiapan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Daerah	249.975.000	239.362.000					
1.	Kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	249.975.000	239.362.000	95,7	10.613.000	98	100	Tidak Tercapai

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Tahun 2019

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada enam kegiatan yang tidak mencapai target minimum, yaitu kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar, kecil dan menengah hanya mencapai 96,3% dari 98% yang merupakan target minimumnya, kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha yang hanya mencapai 87,4% dari 98% yang merupakan target minimumnya, kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal yang hanya mencapai 84,04% dari 98% target minimumnya, penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur yang hanya mencapai 93,9% dari 98% yang merupakan target minimumnya, penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah yang hanya mencapai 93,5% dari 98% yang merupakan target minimumnya, dan kegiatan kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi yang hanya mencapai 95,7% dari 98% yang merupakan target minimumnya.

Setelah melihat fenomena yang terjadi di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung (BPMP), mengenai pelaksanaan kinerja organisasi sudah cukup baik akan tetapi kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan masih belum optimal, hal ini bisa terlihat dari realisasi anggarantahun 2019 hal ini diindikasikan karena belum optimalnya penyerapan anggaran terhadap kinerja organisasi sehingga masing-masing individu dalam organisasi tersebut belum mengetahui secara pasti tujuan yang ingin dituju oleh organisasi tersebut.

Untuk mengetahui sampai mana pengaruh penyerapan anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal Kab. Bandung, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul ***“Pengaruh Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Bandung”***.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut dengan kurangnya implementasi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung dengan hasil observasi di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi ke BKPM RI Jakarta, BPMPT Provinsi Jawa Barat dan SKPD terkait yang berada di wilayah Jawa Barat terkait dengan kerjasama.
2. Kurangnya pengumpulan data dalam rangka penyusunan kajian pemanfaatan aset daerah.
3. Kurangnya penyusunan buku petunjuk pengisian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
4. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tatacara pengisian laporan kegiatan penanaman modal.
5. Kurangnya pengolahan data lapangan hasil pemantauan PMA/PMDN.
6. Kurangnya pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian penanaman

modal dengan bidang lain dilingkungan BPMP.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh satuan kerja terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh SDM terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, satuan kerja, SDM) terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Perencanaan terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh satuan kerja terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh SDM terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, satuan kerja, SDM) terhadap kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk membantu pengembangan teori tentang ilmu administrasi keuangan negara.
- b. Membantu dalam pengembangan teori tentang penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan keuangan daerah dan kinerja organisasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam peningkatan

kinerja organisasi pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi.
- c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi keuangan negara menurut Sutendi (2010:7) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup pembahasan administrasi keuangan negara tergantung dari sudut pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang berbeda akan mencerminkan ruang lingkup yang berbeda.

Pembahasan Administrasi Keuangan dikelompokkan kedalam lima pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiscal, subbidang pengelolaan moneter pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan pajak, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah.
6. Pengeluaran daerah;

Pengelolaan keuangan dapat didefinisikan menurut Yani (2002:348) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan para stake holders baik dipusat maupun di daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Kepala daerah maupun kepala negara sebagai pengelola keuangan negara/daerah telah meminta amanah untuk mengelola keuangan negara/daerah pada masyarakat dalam pemilihan umum (PEMILU). Oleh karena itu, transparansi pengelolaan keuangan menjadi tuntutan mutlak bagi para pengelola keuangan negara

ataau daerah.

Terbitnya 2 paket Undang-undang yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan dan mempertanggungjawabkan uang maupun barang daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan yang lebih transparan dan akuntabel yang menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja serta arus kas daerah selama satu periode juga posisi keuangan pada pelaporan.

Kinerja Organisasi menurut Nasuha (2011:03) adalah sebagai efektifitas secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut Sobandi (2006:179) yaitu sebagai berikut:

1. Keluaran
2. Hasil

3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian

4. Informasi Penjelas

Pertama, keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut.

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per-unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukkan efisiensi relative suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara.

Kempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam laporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja dan menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan.

Menurut Mulyadi dalam Husnayetti (2012:3) mendefinisikan anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang dapat diukur dalam satuan

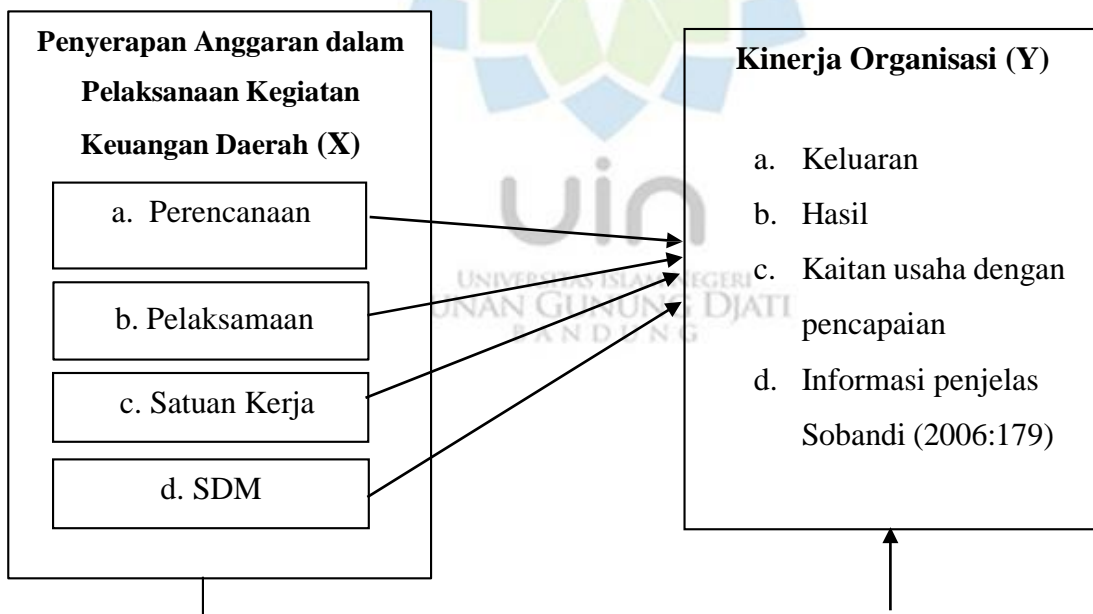
moneter standar (mata uang lokal) dan satuan moneter yang lain (valuta asing) yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan, pengawasan dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Adapun indikator penyerapan anggaran Mardiasmo (2012:133) yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Internal Satuan Kerja
- d. SDM



Melihat dari pernyataan di atas, maka dengan demikian peneliti berpendapat bahwasannya ada pengaruh antara penyerapan anggaran terhadap kinerja organisasi. Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan keuangan daerah yang dijalankan dalam instansi pemerintahan yang baik dan tersusun secara cermat dengan target realisasi yang telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan tentu akan berdampak positif terhadap bagaimana instansi pemerintah dapat mencapai target-target indikator kinerja organisasi terlihat dari *output* yang dihasilkan dari setiap target dan program organisasi.

Berdasarkan uraian di atas untuk menyederhanakan model penelitian, maka model penelitian penulis sajikan dalam gambar kerangka pemikiran pada halaman selanjutnya sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka berpikir

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat di uji. Oleh karena itu hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat pernyataan (*declarative*) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu atau lebih variabel dengan variabel lain. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran untuk menerima atau menolak jawaban tentatif (Silalahi 2012:160).

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono 2012:64).

Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2012:69).

Berdasarkan rumusan masalah pada sub-bab sebelumnya penulis menyatakan bahwa hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini adalah hipotesis yang bersifat parsial dan simultan.

Variabel Perencanaan (X1) Terhadap Kinerja Organisasi (Y)

H1 : Terdapat pengaruh positif antara perencanaan (X1) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara perencanaan (X1) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

Variabel Pelaksanaan (X2) Terhadap Kinerja Organisasi(Y)

H1 : terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan (X2) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan (X2) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

Variabel Satuan Kerja (X3) Terhadap Kinerja Organisasi (Y)

H1 : Terdapat pengaruh positif antara satuan kerja (X3) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara satuan kerja (X3) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

Variabel SDM (X4) Terhadap Kinerja Organisasi (Y)

H1 : Terdapat pengaruh positif antara SDM (X4) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung .

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara SDM (X4) terhadap kinerja organisasi (Y) pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

Variabel Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Keuangan

Daerah (X) Terhadap Kinerja Organisasi (Y)

H1 : Terdapat pengaruh positif antara Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Daerah (X) Terhadap Kinerja Organisasi (Y)

H0 : Tidak Terdapat pengaruh positif antara Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Daerah (X) Terhadap Kinerja Organisasi (Y)

